

**REALISASI PROGRAM BPD PEDULI DALAM  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DI KOTA PEKANBARU  
(Studi dalam Program Kerjasama Bank Riau Kepri  
Cabang Pasar Pusat Dengan Desperindag)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam**



**Disusun Oleh :**

**NELA APNIDAYANIS  
1062 500 3830**

**PROGRAM SI**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2011**



## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan yang selama ini dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah yang mana mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha meskipun sudah mendapatkan tambahan modal dari Bank Riau. Pada hal modal tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat, Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, dan Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Plaza Sukaramai blok TA 04-SA 1 Pekanbaru. Subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan, Karyawan dan Nasabah sedangkan yang menjadi objeknya adalah Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha yang mendapatkan kredit dari Bank Riau sebanyak 200 orang. Karena jumlah populasi cukup banyak, maka penulis menggunakan sample sebanyak 20 orang pengusaha. Sumber Data dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada Pimpinan, Karyawan dan Nasabah, dan Data Sekunder Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan erat dengan judul dalam skripsi ini. dengan menggunakan Metode Pengumpulan Data melalui Observasi, Wawancara, Dokumen dan Studi Pustaka. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah dengan menggunakan Metode Analisa Data Deskriptif Analitik yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan kemudian data tersebut diuraikan secara

rinci dan sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran secara utuh tentang permasalahan yang akan diteliti.

Kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian ini adalah dapat diketahui dari Realisasi Program BPD Peduli yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru melalui penyaluran kredit tanpa agunan kepada para pengusaha pedagang kue yang memakai gerobak di Jalan Samratulangi Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dan masih terdapat kendala seperti kemacetan dalam pembayaran kredit kebank riau oleh pihak nasabah dan pihak Bank juga perlu mengadakan penyuluhan tentang prospek usaha yang jelas, dengan memberikan pembinaan kepada nasabah dalam menjalankan usaha guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha yang dijalankan oleh nasabah sehingga apabila terjadi kredit macet dapat diatasi dengan baik.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusa Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaa Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG BANK RIAU KEPRI CABANG</b>	
<b>PASAR PUSAT</b>	
A. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.....	14
B. Visi Dan Misi.....	15
C. Pilosofi Logo Bank Riau.....	16
D. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Cabang Pasar pusat.....	18
E. Produk dan Layanan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.....	22

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG REALISASI PROGRAM BPD**

#### **PEDULI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

A. Pengertian Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah.....	26
B. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Usaha Kecil & Menengah.....	34
C. Bentuk Program Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil & Menengah.....	35
D. Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Kecil & Menengah.....	36

### **BAB IV REALISASI PROGRAM BPD PEDULI PADA BANK RIAU KEPRI**

#### **CABANG PASAR PUSAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PEKANBARU**

A. Pelaksanaan Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.....	40
B. Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.....	51
C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru.....	56

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan Nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan perekonomian harus memperhatikan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Salah satu tujuan dilaksanakan pembangunan perekonomian pada setiap Negara agar terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat yang mana segala usaha kegiatan dan pembangunan harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha kecil dan menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha kecil lebih siap dengan perubahan pasar. Peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam mengembangkan dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Bank Syari'ah (Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) (Yogyakarta : Ekonesia, 2003) hal. 50. cet. Ke 2

Pengembangan usaha kecil juga dapat memberikan kontribusi pada *diversifikasi* ekonomi dan perubahan struktur sebagai prokondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan bagi perekonomian Indonesia.

Dalam pembangunan suatu bangsa mencakup didalamnya pembangunan ekonomi, maka keberadaan lembaga keuangan diharapkan untuk berpartisipasi membentuk kelancaran dibidang ekonomi, sebab hal itu merupakan suatu faktor yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dalam kesejahteraan masyarakat

Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Ada tiga jenis lembaga keuangan di Indonesia dan sah menurut hukum Islam yaitu bank, pasar modal, asuransi, dan masih ada lembaga keuangan lainnya, namun lembaga keuangan tersebut lebih bersifat sosial.<sup>2</sup>

Sebagaimana halnya menurut UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Y.Sri Susilo, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Selemba empat, 2000) hal. 18

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 3



Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas atau yang sering dikenal dengan *Funding*. Sedangkan aktivitas perbankan yang kedua adalah memutar kembali dana yang telah berhasil dihimpun dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Aktivitas ini disebut dengan *Lending*. Dalam pemberian kredit dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga.

Sebagaimana menurut Undang-Undang tentang Perbankan No 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>4</sup>

Malayu S.P Hasibuan memberikan sebuah defenisi tentang kredit. Menurutnya kredit adalah keseluruhan pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu bunga dan provisi. Ruang lingkup kredit adalah sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 92. Edisi Ke 6

<sup>5</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001) hal. 87

serta penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena itu diperlukan upaya yang profesional khususnya Bank dalam menangani perkreditan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam kegiatannya Bank Riau membentuk organisasi yang berbasis *Strategi Bussines Unit* atau SBU yang dilakukan untuk untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan market share, sehingga dengan organisasi yang baru ini Bank Riau memiliki 5 unit bisnis yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan yang terdiri dari SBU/Divisi Komersial, SBU/Divisi Mikro & Kecil, SBU/Devisi Konsumer, SBU/Divisi Treasury & Internasional, SBU/ Divisi Syari'ah.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam memperluas jaringan distribusi dan memberikan pelayanan terhadap nasabah, dengan pembukaan cabang diwilayah ekonomi yang strategis dan potensi terutama bagi para pengusaha kecil dan menengah sebagai mitra dalam pengembangan usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat mengeluarkan suatu produk pangsa pasarnya adalah masyarakat ekonomi rendah yang ingin mengembangkan usahanya, adapun produk tersebut adalah kredit tanpa agunan untuk membantu para usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kecil dan investasi. Yang mana kredit diberikan tanpa agunan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Abadi, 2003) Cet.1, hal. 365

<sup>7</sup> Agenda 2010 Bank Riau

<sup>8</sup> *Ibid*

Sasaran utama dalam pembangunan ekonomi perlu diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan dari pihak pemerintah baik yang bersifat mikro, sektoral maupun regional. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah dengan membentuk program BPD Peduli dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang merupakan upaya bersama antara pihak Bank dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah sebagai mitra dalam pengembangan usaha. Dengan kehadiran program ini merupakan suatu *alternatif* pemecahan masalah permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya.<sup>9</sup>

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>10</sup>

Pembangunan nasional pada hakikatnya berawal dari pembangunan Ekonomi Daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi, seimbang, dan sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.<sup>11</sup> dengan itu pemerintah perlu membentuk kemitraan usaha antara pemerintah daerah dengan sektor usaha untuk

---

<sup>9</sup> Bapak Hadi Pratikno, Pimpinan Seksi Pemasaran, *Wawancara*, Sudirman, Tanggal 20 Pebruari 2011.

<sup>10</sup> Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000) hal. 197

<sup>11</sup> Zulkarnain, *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin)*, (Yogyakarta : Adicpta Karya Nusa, 2006 ) Cet.Ke 1 hal. 74

mencipta suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat mengucurkan dana pinjaman lunak pada pengusaha kecil pedagang kue yang memakai gerobak di jalan Samratulangi di Pekanbaru masing-masing pedagang menerima 5 juta. Pinjaman ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan usaha supaya maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang. Pihak Bank Riau telah bertekad untuk membantu, membina, membimbing baik dari segi pengelolaan manajemen usaha maupun pengelolaan dalam pengendalian penggunaan dana terhadap pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha.

Namun persoalan selama ini para pengusaha kecil dan menengah sulit dalam mengembangkan usaha. Hal tersebut terkendala oleh modal, pada hal modal usaha mempunyai peran yang penting dalam menentukan keberhasilan usaha tersebut. Meskipun sudah mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha adalah lemah dalam pengelolaan manajemen usaha, teknik produksinya dan dalam hal pengendalian penggunaan dana, serta kurangnya kemampuan perencanaan dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini harus diatasi dengan komitmen yang jelas dan mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak baik pemerintah, maupun lembaga keuangan seperti perbankan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. serta memberikan pembinaan kegiatan kepada para pengusaha kecil dan menengah yang bersifat dinamis sesuai dengan upaya dalam prioritas pembangunan perekonomian masyarakat, tetapi program yang telah dicanangkan oleh Desperindag dengan Bank Riau tersebut belum sesuai dengan realisasi yang terdapat, karna ada sebagian pola pikir nasabah tentang kredit tanpa agunan ini merupakan dana hibah yang tidak harus dikembalikan, padahal dana kredit tersebut harus dikembalikan lagi.<sup>12</sup> Kendala lain yang dihadapinya adalah penyalahgunaan kredit yang diberikan oleh pihak bank, kredit yang diberikan untuk modal dalam mengembangkan usaha tapi digunakan untuk keperluan lain.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana Realisasi Program BPD Peduli yang dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, apakah telah sesuai dengan peran Bank dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah atau merupakan data informasi yang belum difublikasikan. oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan disusun dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul : **Realisasi Program BPD Peduli Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru ( Studi dalam Program Kerjasama Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Dengan Desperindag).**

---

<sup>12</sup> Ibid Wawancara, Sudirman, Tanggal 20 Pebruari 2011

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyak masalah yang diteliti serta terbatasnya waktu dan dana yang ada, dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu hanya pada Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di kota Pekanbaru ( Studi dalam program Kerjasama Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan Desperindag ).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di kota Pekanbaru pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat ?
2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Realisasi Program BPD peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat ?
3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat ?

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Realisasi Program BPD Peduli yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat
- c. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Strata Satu (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
- b. Untuk memperkaya khasanah keilmuan, terutama bagi penulis mengenai Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di kota Pekanbaru. ( Studi dalam Program Kerjasama Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan Desperindag)
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat yang berlokasi di Jln. Jendral Sudirman Komplek Plaza Sukaramai Blok TA 04-SA 1 Pekanbaru. Alasan penulis memilih Bank Riau sebagai tempat penelitian karena salah satu lembaga keuangan yang melayani nasabah baik dari segi menghimpun maupun menyalurkan kredit dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, dan memberikan jasa perbankan lainnya terhadap nasabah. Sehingga dapat memberikan data yang valid tentang Realisasi Program BPD Peduli Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat. Sedangkan yang menjadi Objeknya adalah Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru

### **3. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat pada bagian kredit yaitu sebanyak 5 orang. Dan para pengusaha yang mendapatkan kredit sebanyak 200 orang dan dijadikan sampel sebanyak 10 % yaitu 20 orang nasabah. pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan



teknik *Purposive Sampling* yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan peneliti yang dapat dianggap representatif.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat serta para pengusaha yang mendapatkan kredit dari Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya buku perbankan dan buku-buku lainnya.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam mengetahui permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh pemecahan masalah yang baik, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi yaitu dalam penelitian ini penulis juga melakukan peninjauan langsung lapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.
- b. Interview yaitu melakukan wawancara langsung dengan responden penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu : Pimpinan Pemasaran Komersil Mikro & Kecil pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar pusat Jln. Jendral Sudirman Komplek Plaza Sukaramai Blok TA 04 Pekanbaru. ( Hadi Pratikno ), Analis Kredit Komersil ( Wan Nerson dan

Silvia Monika ), Analis KPR ( Raulpandi ), Analis KKB ( Sari Aprilia ), dan nasabah pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat yang terletak di Jalan Samratulangi Pekanbaru.

- c. Studi Pustaka pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari dari referensi / literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori dan pemecahan masalah.
- d. Dokumen yaitu dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan Dokumen-dokumen dari Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat

## **6. Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

## **7. Metode Penulisan**

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu penulis mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan pemaparan yang sistematis, maka penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG BANK RIAU KEPRI CABANG PASAR PUSAT**

Dalam bab ini diuraikan tentang Sejarah berdirinya Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat, Filosofi Logo, Produk dan layanan Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG REALISASI PROGRAM BPD PEDULI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

Dalam bab ini diuraikan Pengertian Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, UU dan Peraturan Tentang Usaha Kecil dan Menengah, Bentuk Program dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB IV : REALISASI PROGRAM BPD PEDULI PADA BANK RIAU  
KEPRI CABANG PASAR PUSAT DALAM PEMBERDAYAAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PEKANBARU**

Mengenai bagaimana Pelaksanaan Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Apa yang menjadi Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah oleh Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG BANK RIAU KEPRI**

#### **CABANG PASAR PUSAT**

##### **A. Sejarah Berdirinya Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat**

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik Pemerintah Kabupaten atau Kota Provinsi Riau yang didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH. Tk. I No. 51/IV/1996 tanggal 1 April 1996 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur kedalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung mulai tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan daerah No. 14 Tahun 1992. berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 Tentang Perbankan.

Sesuai dengan keputusan RUPS Tanggal 26 Juni 2002 dan dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 36 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM surat Keputusan No. C-09851. HT. 01. TH. 2003 Tanggal 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 Tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank

Pembangunan Daerah Riau menjadi Berbadan Hukum PT. Sampai saat ini PT. Bank Pembangunan Daerah Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 kantor Cabang dan 15 Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Kas, 1 Kantor Kas Syari'ah serta payment point yang tersebar diseluruh Kabupaten/ kota Di Riau.<sup>1</sup> Bank riau Kepri Cabang Pasar Pusat yang berlokasi Di Jln. Jendral Sudirman Plaza Sukaramai Lt.1 Blok TA 04 resmi beroperasi pada tahun 1992 yang merupakan salah satu cabang utama dari Bank Riau Kepri Di Jln. Jendral Sudirman.

## **B. Visi Dan Misi Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat**

### **Visi**

Bank riau sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

### **Misi**

- ❖ Sebagai “Bank sehat” elit dan merakyat
- ❖ Sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah
- ❖ Sebagai pengelola dana pemerintah daerah
- ❖ Sebagai sumber pendapatan daerah
- ❖ Sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan menengah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.bankriau-kepri/sejarahsingkat.co.id](http://www.bankriau-kepri/sejarahsingkat.co.id) ( diakses tanggal 28 Maret 2011 )

<sup>2</sup> Agenda 2010 Bank Riau Hal. 2

### **C. Filosofi Logo Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat**

#### **❖ Layar Berkembang**

Diilhami oleh latar belakang alam dan masyarakat Riau yang sangat dekat dengan kehidupan air, ide dasar *corporate identity* ( logo ) Bank Riau adalah tiga layar berkembang. Layar dan perahunya adalah simbolisasi adanya aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi air. Layar berkembang merupakan interpretasi dari :

- Simbol kedaerahan Riau yang khas
- Semangat menjaga keteguhan ( dalam keimanan )
- Terjaganya keutuhan dalam kesatuan identitas
- Kesiapan mengurangi perjalanan ( menuju satu tujuan yang lebih baik)

Tiga layar berkembang adalah lambang dari filosofi TEGUH, UTUH, dan TUMBUH. Identitas Bank Riau sebagai landasan dalam setiap aktivitasnya.

#### **❖ Teguh**

Representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah goyah. Dengan spirit TEGUH, Bank Riau mewujudkan integritas sebagai bank yang memegang teguh norma keimanan yang berlaku. Konsisten dengan komitmen yang telah disepakati, serta tegas dalam kebijakan ( mengarahkan visi dan menjalankan misi ).

❖ **Utuh**

Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu sehingga menjadi UTUH dan solid serta “*compact*” dalam satu sinergi. Sebagai bank daerah, Bank Riau terus membina interaksi antar insan Bank Riau dan kemitraan dengan masyarakat/ nasabah ( stake holder ) melalui kerjasama dan layanan terbaik

❖ **Tumbuh**

Bank Riau terus TUMBUH, maju, progresif, dinamis. Kredibel dengan kinerja unggul dan performa prima, serta inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jaman.

**Inspirasi Warna**

- ❖ Kuning Keemasan : Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan kegemilangan ( glory )
- ❖ Merah Maroon : Ekspresi semangat berkarya ( Aktif ), semangat perjuangan dan produktifitas
- ❖ Hitam : Identik dengan keteguhan, tegas, formal, sopan,dan mantap.



#### **D. Struktur Organisasi**

Organizing atau organisasi merupakan suatu proses yang dilakukan pimpinan perusahaan dalam mengkoordinir dan menggerakkan semua sarana yang tersedia serta membagi tugas dalam usaha mencapai target yang telah direncanakan.

Organisasi hanya merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai. Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam menentukan, mengelompokkan dan mengatur bermacam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang diberikan pada suatu individu yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam struktur organisasi akan tergambar bagaimana cara pembagian tugas secara masing-masing oleh bagian atau orang yang telah terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka pembagian suatu tenaga kerja akan mudah untuk dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan dikerjakan dengan baik dan juga akan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu struktur organisasi senantiasa ditegaskan dengan job Description. Untuk mengetahui lebih jelas lagi struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Selanjutnya PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat mempunyai Job description dengan rincian sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Bertugas dalam menetapkan tujuan dan kebijakan menyusun rencana strategi pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia atau telah direncanakan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat serta mengawasi dan menilai kegiatan kerja stafnya.

2. Auditor Control Internt

Membantu pimpinan cabang dalam pengawasan aktivitas staf dan karyawan PT.Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat sehingga terjadi Efisiensi dan memperkecil resiko kegagalan kerja.

3. Pinsi. Operasional

Kepala bagian yang bertanggung jawab atas semua operasional pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat baik kegiatan transaksi maupun kegiatan yang berlangsung pada bank tersebut.

4. Pinsi. Pemasaran Komersil Mikro & kecil

Kepala bagian yang menengani masalah kredit, sekaligus bertanggung jawab atas kredit yang telah disalurkan kepada nasabah dan dalam penagihan kredit apabila ada penunggakan pembayaran kredit.

5. Pinsi. Konsumer

Kepala bagian yang bertugas menerima permohonan kredit dari pegawai negeri sampai mencairkan kredit tersebut.

6. Butik Bank Riau Ciputra

Memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada nasabah dan mitra bisnisnya. Bisa melakukan berbagai transaksi perbankan dibutik mulai dari pembukaan rekening baru ( tabungan, deposito, giro ) serta informasi mengenai produk dan layanan pengajuan kredit dan setor maupun tarik tunai.

7. Adm. Kredit Komersil

Bertugas menerima kredit selain Kredit aneka guna ( KAG ) seperti kerakyatan, komersil dan membuat laporan atas kredit yang telah disalurkan.

8. Analis Kredit Komersil

Orang yang bertugas menganalisis kredit komersil yang telah disalurkan.

9. Adm. KAG

Orang yang bertugas memasukkan data nasabah yang mendapat kredit dari Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.

10. Custamer Service ( CS )

Bertugas melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah dan memberikan informasi tentang produk-produk bank.

11. Teller

Yang bertugas menerima setoran maupun tarik tunai dan perintah bayar yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

12. Kantor Kas Wako

Merupakan kantor kas wali kota yang bertugas memberikan pelayanan terbaik dan maksimal dan bisa melakukan berbagai transaksi baik untuk setor

tunai maupun penarikan tunai, tapi tidak melayani dalam pengajuan kredit oleh nasabah.

#### **E. Produk Dan Layanan Bank Riau**

Sebagaimana bank yang lainnya ada beberapa produk dan layanan yang ditawarkan pada nasabah, adapun produk dan layanan yang terdapat pada bank riau kepri cabang pasar pusat antara lain :

##### **1. Tabungan**

Menurut Undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

##### **a. Sinar ( Simpanan Amanah Riau )**

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang memiliki kelebihan dan fleksibel dalam melakukan penarikan nasabah dapat menyimpan dengan setoran awal Rp50.000 dengan saldo minimum Rp20.000.

##### **b. Simpeda ( Simpanan Pembangunan Daerah )**

Merupakan salah satu jenis tabungan yang bekerja sama dengan bank pembangunan daerah diseluruh Indonesia, setoran awal sesuai dengan kantor cabang masing-masing daerah.

c. Tabungan Dhuha ( Tabungan Haji )

Salah satu jenis tabungan perorangan yang merupakan tabungan baru dikeluarkan tetapi telah banyak diminati oleh masyarakat. Nasabah dapat menyimpan dananya dengan setoran minimal Rp350.000

2. Giro

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Tanggal 10 Nopember 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

3. Deposito

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah peminjam dengan bank. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari deposito berjangka 1 bulan, deposito berjangka 2 bulan, deposito berjangka 3 bulan, deposito berjangka 6 bulan, deposito berjangka 12 bulan sampai dengan deposito berjangka 24 bulan.

4. Penyaluran Dana

Adapun tujuan lainnya dari pendirian bank itu sendiri adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun penyaluran dana kepada masyarakat adalah dalam bentuk kredit, jenis kredit antara lain :

- a. Kredit Modal Kerja / Kredit Niaga Prima
- b. Kredit Bina Prima / Investasi
- c. Kredit Pemilikan Rumah ( KPR )
- d. Kredit Pengusaha Kecil ( KPK )
- e. Kredit Pengusaha Mikro ( KPM )
- f. Kredit Tanpa Agunan ( Kreta )
- g. Kredit Aneka Guna ( KAG )
- h. Kredit Kendaraan Bermotor ( KKB ).

#### 5. Jasa-jasa Bank Riau

Tujuan pemberian jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancarkan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lengkap atau tidaknya jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabah sangat tergantung pada kemampuan bank tersebut baik dari segi modal perlengkapan fasilitas sampai pada personil yang mengoperasikannya. PT. Bank Riau jasa bank ini cukup banyak dan beragam dalam melayani kebutuhan nasabah seperti Transfer, Kliring, Inkaso, dan Referensi Bank, Penerimaan Bayaran dan lainnya

#### 6. Kartu-Kartu

Kartu ATM, Kartu Kredit Bank Riau Vista





**BAB III**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG REALISASI PROGRAM**

**BPD PEDULI PEDULI DALAM PEMBERDAYAAN**

**USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**A. Pengertian Program BPD Peduli Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah.**

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan dalam upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan, motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan mereka yang berprestasi.<sup>1</sup>

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>2</sup>

Program BDP Peduli dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah program yang bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh kredit modal kecil dan investasi dimana kredit yang

---

<sup>1</sup> HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007) Cet. Ke 1 hal. 77

<sup>2</sup> UU Perekonomian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Bandung : Tim Redaksi Fokus Media, 2008) hal. 58

diberikan tersebut adalah kredit tanpa agunan yang diberikan kepada masyarakat pelaku ekonomi yang bersifat produktif baik untuk modal kerja maupun investasi untuk pengembangan usaha disektor perdagangan, perindustrian, jasa, dan sektor produktif lainnya yang merupakan upaya bersama Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi para usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya supaya maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang

Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Memberdayakan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah dengan melakukan langkah sebagai berikut :

1. Pilihlah usaha kecil dan menengah masing-masing daerah
2. Usaha kecil dan menengah membuat sample produk yang dibuat

3. Mencari keuntungan atau kelebihan dari setiap usahanya dengan bantuan tenaga ahli
4. Bila ada pesanan yang sudah pasti, usaha kecil dan menengah dapat dibantu oleh pihak penjamin dengan dasar surat pesanan.
5. Diperlukan tenaga pendamping yang bertugas untuk mempersiapkan usaha kecil menengah siap mandiri, berbasis kualitas, dan usaha kecil dan menengah siap melakukan perbaikan terus menerus.<sup>3</sup>

Adapun tujuan dari pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>4</sup>

Kementrian Koperasi mengelompokkan UKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan, dan status usahanya. Adapun pengertian Usaha Kecil berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan

---

<sup>3</sup> Vita Sarasi, *Strategi Pengembangan Bisnis Berbasis Kualitas Produk Pada UKM*, (Jawa Barat : majalah Usahawan, 2001) Cet. Ke 1 hal. 14

<sup>4</sup> UU Perkoperasian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, *Op. Cit*, hal. 61

bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>5</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Menengah dijelaskan dalam INPRES No.10 Tahun 1999 adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih dari Rp200 juta sampai maksimal Rp10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>6</sup>

Adapun kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih atau total aset paling banyak Rp 200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah )
2. Memiliki hasil penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1000.000.000 ( Satu milyar rupiah )
3. Milik warga negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi entah langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau dengan usaha besar
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 42

<sup>6</sup> Ibid, hal. 46

<sup>7</sup> Widi Nugroho, *Informasi Kredit Usaha Kecil / Bina Wirausaha*, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1997) Hal. 51

Sedangkan kriteria Usaha Menengah dalam Undang-undang terbaru UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar.
2. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.500.000.000-10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000-Rp.50.000.000.000.<sup>8</sup>

Usaha kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu :

1. Penyediaan barang jualan
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan
4. Nilai tambah bagi produk daerah
5. Peningkatan taraf hidup.<sup>9</sup>

*Penyediaan barang jualan* merupakan salah satu unsur utama aktiva lancar. Kesalahan didalam penentuan banyaknya penyediaan barang jualan akan

---

<sup>8</sup> TIM CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : PT. Bahana, 2009) hal.15

<sup>9</sup> Faisal Basri, *Pembangunan Kritik dan solusi Menuju Kebangkitan Indonesi*, (Pustaka Sinar Harapan, 2003) Cet. Ke 2, hal. 6-7

mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Pada sisi lain peran dan fungsi usaha kecil sebagai *penyerap tenaga kerja*, memang pada umumnya kebutuhan tenaga kerja pada tiap-tiap usaha kecil relative sedikit, namun karena pengusaha kecil relative banyak jumlahnya dan usaha yang dijalankan pada umumnya bersifat padat karya, maka kontribusi didalam penyerapan tenaga kerja cukup besar. Dengan terserapnya tenaga kerja berarti jumlah pengangguran dapat dikurangi. Ini dimungkinkan *pemerataan pendapatan* masyarakat semakin dapat diwujudkan. Usaha kecil yang sudah maju selalu mendorong para pengelolahnya untuk lebih kreatif dan inovatif sehingga produk yang dihasilkan selalu terjaga dan terpelihara mutunya, bahkan produk yang dihasilkan perusahaan sudah dikenal dimana-mana. Hal semacam ini bukan saja berdampak positif bagi kelangsungan usahanya namun secara tidak langsung juga memberikan nilai tambah bagi daerah dimana usahanya berada. Usaha kecil dapat dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian, dimana usaha kecil dapat menggalang kekuatan ekonomi secara mendasar dengan masyarakat baik sebagai subjek maupun sebagai objeknya, maka akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat secara umum.

Usaha kecil menengah dianggap sektor usaha yang tahan banting karena usaha kecil dan menengah mampu bertahan tidak mengalami kebangkrutan meskipun krisis melanda pada tahun 1997 namun usaha kecil dan menengah tetap bertahan meskipun banyak kelemahan-kelemahan yang terdapat pada usaha kecil menengah yaitu :

## **1. Permodalan**

- a. Kurang akses Bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya
- b. Prosedur pemberian kredit berbelit, lama dan suku bunga tinggi
- c. Bank kurang mengalami kriteria UKM sehingga kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan
- d. Kurang kemampuan komoditas UKM membuat standar proposal yang baik benar
- e. Kurangnya pembinaan tentang manajemen keuangan seperti perencanaan, pencatatan laporan.
- f. Kredit yang diperlukan UKM tidak jelas atau tidak diketahui oleh pengusaha.

## **2. Pemasaran**

- a. Akses terhadap informasi pasar kurang
- b. Terbatasnya tempat pemasaran
- c. Kesulitan mencari agen atau pembukuan outlet
- d. Kurangnya manajemen pemasaran
- e. Kemampuan negosiasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak.

## **3. Bahan baku**

- a. Harga bahan baku yang mahal dan berfluktuasi akibat borongan oleh pedagang besar yang mampu mengontrol bunga
- b. Bahan baku yang diberikan tidak berproduksi lagi

- c. Kesulitan penyimpanan dan pengiriman tidak tepat waktu
- d. Lokasi sumber bahan baku jauh.

#### **4. Teknologi**

- a. Kurangnya pelatihan untuk teknologi baru atau tepat guna
- b. Kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi baru

#### **5. Manajemen**

- a. Tidak ada pembagian kerja yang jelas
- b. Kuatnya pengaruh perseorangan
- c. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dan keluarga
- d. Kurang mampu mengadakan, perencanaan, pencatatan, dan pelaporan
- e. Asosiasi yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tidak ada jaringan pemasaran, dan tidak ada layanan dari pemerintah.

#### **6. Birokrasi**

- a. Kurang informasi tentang izin yang harus dimiliki, prosedur pengurusan, sistem pembayaran, prosedur pengurusan waktu yang lama dan berbelit-belitnya pengurusan
- b. Pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan
- c. Pungutan yang tidak jelas
- d. Adanya monopoli dan tidak berpihakan pemerintah pada UKM



## **7. Infrastruktur**

- a. Tarif mahal dan pelayanan kurang
- b. Kualitas/kuantitas kurang

## **8. Kemitraan**

- a. Sistem pemasaran bersama yang banyak merugikan UKM
- b. Sistem pembayaran yang merugikan
- c. Kurangnya transfer teknologi.<sup>10</sup>

## **B. Undang-undang dan Peraturan Tentang Usaha Kecil dan Menengah**

- 1. Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- 2. PP. No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
- 3. PP. No. 33 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- 4. Inpres. No. 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- 5. Keppres No. 127 Tahun 2001 Tentang bidang atau jenis usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan
- 6. Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang Rekstruasi Kredit Usaha Kecil Menengah
- 7. Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung : Alfabet, 2009)  
Cet. Ke2. hal. 66

### **C. Bentuk Program Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Bentuk program-program pemerintah yang telah dilaksanakan terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam aspek fisik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program dalam Peningkatan kemampuan usaha
2. Program pengembangan wiraswasta dan tenaga professional
3. penyediaan tenaga penyuluh lapangan
4. Program Penciptaan / pengaturan iklim dan kerjasama
5. Program penelitian dan pengembangan industri kecil
6. Program pengembangan usaha kecil dari perguruan tinggi negeri dan swasta
7. seminar dan pameran produk-produk industri kecil tingkat nasional maupun internasional.<sup>12</sup>

Hubungan bisnis yang saling menunjang tentu dibutuhkan oleh perusahaan menengah maupun besar seperti membeli bahan baku dan mengangkutnya ke pabrik, subkontrak pembuatan komponen membuat jaringan distribusi, penjualan dalam jumlah besar serta jaringan jasa pelayanan dan perbaikan. Aktivitas saling menunjang ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan kecil, karena perusahaan menengah dan besar hanya menangani pekerjaan dalam skala besar yang lebih vital.

---

<sup>11</sup> Arief Rahmana, Undang-Undang Dan Peraturan Tentang UKM , [www.Google.co.id](http://www.Google.co.id) ( Diakses Tanggal 01 April )

<sup>12</sup> M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000) Hal. 85

Perusahaan besar menyadari akan pentingnya perusahaan kecil, oleh karena itu dalam hubungan ini tidak segan-segan untuk memberikan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan usaha kecil.

#### **D. Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Kecil**

Berikut ini akan dipaparkan kebijakan pemerintah tentang usaha kecil berkaitan dengan *iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan, jaminan dan izin usaha*.

##### **1. Iklim Usaha**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang mencakup tujuh aspek adalah sebagai berikut :

###### **a. Aspek Pendanaan**

Dimana pemerintah berusaha memperluas sumber pendanaan dan meningkatkan akses terhadap sumber pandangan yang mencakup berbagai upaya penyederhanaan tata cara dalam memperoleh dana.

###### **b. Aspek Persaingan**

Dimana pemerintah menganjurkan agar usaha kecil dapat meningkatkan kerja sama usaha kecil baik dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha, disamping itu pemerintah juga akan selalu berusaha membentuk struktur pasar yang sehat agar tidak tumbuh dan berkembang persaingan yang tidak sehat seperti adanya *monopoli, oligopoly*, dan *monopsini* yang dapat merugikan usaha kecil.

c. Aspek Prasarana

Aturan mengenai prasarana umum ditentukan demi mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil seperti penyediaan prasarana yang memadai bagi pengembangan usaha kecil yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, lokasi usaha dan tempat usaha dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil.

d. Aspek Informasi

Membentuk dan memanfaatkan Bank data dan jaringan informasi bisnis, mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu

e. Kemitraan

Aturan pemerintah mengenai mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar.

f. Perizinan Usaha

Memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan usaha.

g. Perlindungan

Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dipasar dan lokasi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.<sup>13</sup>

## **2. Pembinaan dan Pengembangan**

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dalam bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. *Bidang produksi dan pengelolaan* dengan cara meningkatkan kemampuan management serta teknik produksi dan pengelolaan, meningkatkan rancang bangun, serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengelolaan bahan baku. *Bidang pemasaran* dengan cara melaksanakan pengkajian penelitian dan pengkajian pemasaran dan memasarkan produk usaha kecil. *Bidang sumber daya manusia* melalui cara masyarakat dan membudayakan kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan teknik dan manajerial. Serta Pembinaan dan Pengembangan *Bidang Teknologi* dengan cara meningkatkan kemampuan teknologi produksi dan pengendalian mutu, meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk melaksanakan pengembangan desain dan teknologi baru.

## **3. Pembiayaan dan Penjaminan**

Pembiayaan dapat disediakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan juga oleh masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 30-32

penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lainnya. pembiayaan bagi usaha kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin milik pemerintah atau swasta. Lembaga penjamin yang menjamin pembiayaan usaha kecil tersebut dalam bentuk penjaminan pembiayaan kredit perbankan, penjaminan pembiayaan bagi hasil. Lembaga penjaminan terdiri dari lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai penjamin. Pembiayaan dan penjamin menyangkut alokasi, tata cara, prioritas dan jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil dan Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia, 2001) hal. 32-35







**BAB IV**

**REALISASI PROGRAM BPD PEDULI PADA BANK RIAU KEPRI**

**CABANG PASAR PUSAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA**

**KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PEKANBARU**

**A. Pelaksanaan Program BPD Peduli Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Realisasi program BPD Peduli dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh kredit modal kecil dan investasi dimana kredit yang diberikan tersebut adalah kredit tanpa agunan yang merupakan upaya bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag) dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi para usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya supaya maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Komitmen Bank Riau untuk fokus dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah terus dilakukan. Dalam kegiatannya Bank Riau membentuk organisasi yang berbasis *Strategi Bussines Unit* untuk mempercepat pertumbuhan, peningkatan market share dan meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan perekonomian masyarakat terutama bagi para pengusaha

---

<sup>1</sup> Hadi Pratikno, Pimpinan Seksi Pemasaran, wawancara, Tanggal 10 Mei 2011

kecil maupun menengah sebagai mitra dalam pengembangan usaha. Kemitmen ini semakin mantap dalam melangkah Bank Riau sebagai Bank yang fokus dalam sektor UKM dan sebagai prioritas utama dalam penyaluran kredit, Sebagaimana apa yang telah menjadi misi bank riau yaitu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pembina dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk tiap tahunnya dan juga dampak positif bagi perkembangan usaha kecil dan menengah, sehingga dengan adanya upaya bersama pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan Desperindag melalui Program BPD Peduli dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kota Pekanbaru melakukan berbagai analisis dalam prospek pengembangan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha kecil dan menengah dengan menyalurkan kredit tanpa agunan yang diperuntukan kepada masyarakat pelaku ekonomi khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usahanya yang bersifat produktif baik untuk modal kerja maupun investasi untuk pengembangan usaha disektor perdagangan, perindustrian, jasa dan sektor produktif lainnya.

Kredit ini ditujukan bagi pengusaha yang mempunyai bisnis yang layak namun tidak memenuhi persyaratan perbankan. Misalnya tidak mempunyai jaminan. Dengan adanya upaya bersama dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Desperindag ), Bank memberikan permodalan yang dibutuhkan oleh para pedagang. Jaminan yang diberikan adalah usaha yang dijalankan oleh pedagang tersebut. Dalam hal ini pihak Bank Riau telah menyalurkan pinjaman

lunak pada para pengusaha pedagang kue yang memakai gerobak di Jalan Samratulangi Pekanbaru, masing-masing pedagang mendapat 5 juta dengan menerapkan sistem jangka waktu pengembalian kredit yang cukup lama yaitu 24 bulan jadi perbulannya kecil sekali maka manfaatkanlah dana tersebut untuk mengembangkan usaha. Namun dalam pelaksanaan penyaluran kredit tersebut terdapat kendala- kendala diantaranya :

1. Pengembalian kredit yang tidak lancar oleh nasabah, dikarenakan pola pikir nasabah tentang kredit tanpa agunan ini merupakan dana hibah yang tidak harus dikembalikan, pada hal dana tersebut harus dikembalikan bagi nasabah yang mempunyai pinjaman di Bank.
2. Banyak masyarakat membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha mereka, namun ada sebagian nasabah menyalahgunaan kredit yang diberikan oleh Bank, kredit yang diberikan untuk modal dalam mengembangkan usaha tapi digunakan untuk keperluan lain.<sup>2</sup>
3. Usaha yang dijalankan terjadi kebangkrutan atau disebabkan oleh faktor alam seperti kebakaran, banjir dan gempa. Faktor alam ini sangat berpengaruh terhadap prospek usaha nantinya sehingga mengalami penurunan omset / pendapatannya jadi berkurang
4. Para pengusaha dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, seperti menjalankan usaha yang penting bisa jalan tanpa mengantisipasi hambatan

---

<sup>2</sup> Ibid, Wawancara

yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya tersebut dan pengendalian dalam penggunaan dana.<sup>3</sup>

Dari kendala yang dihadapi oleh pihak Bank dalam penyaluran kredit dapat kita uraikan diantaranya adalah pihak debitur dalam perjanjian kredit tidak sesuai kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk modal dalam mengembangkan usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain, hal ini disebabkan karena kecerobohan nasabah dalam penggunaan kredit, sehingga mengakibatkan kredit yang dijalankan mengalami kemacetan atau tidak lancar.

Kemudian juga adanya faktor yang mempengaruhi usaha pedagang seperti kebakaran, banjir dan gempa. Apabila debitur mengalami musibah ini, maka debitur akan kesulitan membayar kewajibannya kepada Bank karena menanggung kerugian dari usaha tersebut. Kendala lain juga timbul dari para pengusaha itu sendiri, seperti adanya persaingan usaha sejenis dari para pesaing usaha lainnya, seperti sama-sama berdagang usaha kue ditempat yang sama, hal ini tentu saja menimbulkan persaingan usaha dalam pendapatan pedagang, sehingga hasil usaha pedagang tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit ke Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.

Kredit yang bermasalah dapat disebabkan oleh pihak Bank sendiri, maupun pihak nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan

---

<sup>3</sup> Wan Nerson, Analis kredit komersil, wawancara, Tanggal 10 Mei 2011

khususnya dalam masalah penyaluran kredit pada usaha kecil dan menengah. Penyelesaian kredit yang bermasalah dilakukan dengan beberapa tindakan seperti dengan menelpon pihak nasabah memberi surat peringatan pertama apabila surat peringatan pertama tidak ditanggapi mengirim surat peringatan yang kedua dan yang terakhir dengan cara mendatangi tempat lokasi dimana nasabah menjalankan usahanya atau dengan menyita barang jaminan.

Dalam mengatasi kredit yang bermasalah diperlukan upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah ini dengan melakukan solusi dalam penyelesaian kredit macet diantaranya sebagai berikut :

1. Pihak Bank harus benar-benar mengadakan seleksi pada debitur sebelum mencairkan plafon kredit yang diajukan oleh debitur.
2. Menyediakan fasilitas pelayanan asuransi dengan lembaga asuransi terkait terhadap jaminan asuransi usaha debitur agar apabila terjadi musibah dari faktor alam dapat ditanggulangi dengan adanya jaminan asuransi.
3. Pihak Bank mengadakan penyuluhan tentang prospek usaha yang jelas, pihak bank memberikan pembinaan kepada nasabah dalam menjalankan usahanya seperti melakukan kunjungan rutin setiap bulan untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha debitur. Hal ini bertujuan agar dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk kemajuan usahanya. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kreditnya pihak Bank akan mencari solusi yang

tepat dalam penyelesaian kredit tersebut sehingga apabila terjadi kredit macet dapat diatasi dengan cepat.

4. Pihak Bank hendaknya mengambil kebijakan untuk dapat menurunkan suku bunga kredit tanpa agunan ini kedepannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi perekonomian usaha dari pihak pedagang.

Dengan upaya Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dalam hal penyaluran kredit yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pengusaha kecil maupun menengah yang ingin mengembangkan usaha melalui kredit dengan berbagai usaha yang dibiayai adalah sebagai berikut :

1. Kredit modal usaha yang bersifat Usaha Kecil Dan Menengah ( UKM )

Kategori kredit ini meliputi : usaha barang harian, kios minuman, toko kelontongan, bengkel las, usaha ternak, usaha rumah makan, usaha jahit, dan lain-lain. kredit dari bank sebesar 50 juta-100 juta untuk usaha kecil sedangkan usaha menengah sebesar 500 juta- 1 Milyar. Sedangkan untuk para pengusaha pedagang kue yang memakai gerobak yang dikenal kredit tanpa agunan ( Kreta ) masing-masing pedagang mendapat 5 juta.

2. Kredit Konsumer

Kategori kredit ini meliputi : Kredit Kepemilikan Rumah ( KPR ) adalah kredit yang diberikan kepada perorangan, dimana bank riau telah menyiapkan pemilikan rumah untuk membeli tanah dan bangunan rumah tinggal atau ruko dan merenovasi bangunan rumah tinggal. Disini pihak bank riau telah menyalurkan kredit dengan *perumahan Alamanda panam dengan milik*

*Bapak Tulus, Perumahan Pasir Mas Sejahterah, dan Perumahan Citra Riau Gardence.*<sup>4</sup> Kredit Kendaraan Motor ( KKB ) adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif dalam rangka kepemilikan kendraan roda dua dan roda empat dengan pembayaran sistem angsuran baik secara kolektif maupun non kolektif. Dalam hal ini pihak bank riau melakukan kerjasama dengan beberapa dealer kendraan motor melalui skim kredit kendraan motor diantaranya adalah *Yamaha, Honda, Suzuki, Proton, Bajaj dan Mitsubishi* saat ini sedang giat terbina dan diharapkan dapat membantu konsumen untuk segera memiliki kendraan bermotor.<sup>5</sup> Kredit Aneka Guna ( KAG ) adalah kredit yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif diluar KPR Dan KKB diberikan secara kolektif maupun non kolektif dengan tujuan untuk rehabilitas/ renovasi rumah, keperluan rumah tangga, biaya pendidikan serta keperluan lain yang bersifat konsumtif

### 3. Kredit Komersil

Kredit modal kerja atas dasar kontrak dimana kredit yang diberikan kepada rekan yang telah mendapatkan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari pemerintah atau instansi lainnya. proyek yang dibiayai meliputi Pembangunan Jembatan, Pembangunan Gedung, Pengadaan

---

<sup>4</sup> Raulfandi, Analis Kredit Kepemilikan Rumah, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2011

<sup>5</sup> Sari Aprilia, Analis Kredit Kendraan Bermotor, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2011

Barang, Pekerjaan Umum fasilitas lainnya. Dalam kredit ini flapon yang diberikan memiliki BMPK ( batas minimum pemberian kredit ) dari bank.<sup>6</sup>

Melalui hasil wawancara penulis dengan responden maka terlaksana Program BPD Peduli dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan perencanaan yaitu telah disalurkan kredit oleh Bank Riau kepada para pengusaha kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usaha dan masyarakat telah merasakan kegunaan dan maanfaat dari kredit tersebut, serta bisa meningkatkan usaha masyarakat melalui Program BPD Peduli dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah terbentuknya pemberian pinjaman kepada masyarakat diberbagai bidang usaha seperti usaha Perdagangan, Pertanian, Perindustrian dan usaha jasa dan sektor Produktif lainnya.

Bagi pengusaha kecil dan menengah yang ingin mengajukan permohonan kredit harus memenuhi prosedur dan syarat yang sudah ditetapkan oleh Bank Riau. Adapun prosedur dalam penyaluran kredit pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon /debitur datang kebank untuk mengisi blanko permohonan kredit dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Bank meliputi data pemohon kredit, pendapatan usaha nasabah, jumlah plafon kredit yang dibutuhkan, serta jangka waktu pengembalian kredit Setelah itu pengusaha

---

<sup>6</sup> Silvia Monika, Analis Kredit Komersil, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2011



menyerahkan kembali berkas tersebut kepada karyawan Bank dengan melampirkan syarat yang ditetapkan oleh pihak Bank. Adapun syarat-syaratnya adalah :

- a. Pas Photo pemohon ( suami / istri )
- b. Foto Copy KTP pemohon ( suami / istri )
- c. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- d. Foto Copy Surat nikah pemohon ( suami / istri )
- e. Foto Copy Surat Izin tempat usaha ( SITU )
- f. Foto Copy Bukti jaminan dan pembukuan / catatan pendapatan

2. Penyelidikan atas berkas-berkas yang diserahkan oleh calon debitur

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap dan benar-benar memenuhi persyaratan. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon nasabah diminta untuk melengkapi dalam waktu yang ditentukan oleh pihak Bank. Calon debitur tidak tercatat sebagai debitur yang bermasalah.

3. Keputusan Kredit

adalah pimpinan cabang / cabang pembantu bank memberikan keputusan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangan. Keputusan ini mencakup jumlah dana yang akan diterima debitur dan jangka waktu pengembaliannya.

#### 4. Penandatanganan perjanjian kredit

Setelah pihak Bank memberikan keputusan persetujuan kredit, maka pemohon kredit menandatangani surat pernyataan sanggup membayar hutang, sebelum kredit dicairkan

#### 5. Percairan Kredit dan Monitoring

pencairan kredit dapat dilakukan setelah pemohon kredit memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kredit. Pencairan kredit dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan rekening tabungan pemohon kredit. Pengontrolan tetap dilakukan oleh analisis kredit agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal penggunaan dana, apabila terjadi penyimpangan maka pihak bank melakukan peringatan agar penggunaan dana sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati yaitu untuk mengembangkan usaha.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah yang meminjam dana dari Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui kredit tanpa agunan maka saya sebagai peminjam merasa terbantu karena bisa meminjam dalam jumlah dana dengan modal kecil dan juga menerapkan sistem jangka waktu pengembalian kredit yang cukup lama yaitu 24 bulan. Pihak Bank Riau mengatakan manfaatkanlah dana tersebut untuk mengembangkan usaha jangan sampai macet.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumen Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Tahun 2008

<sup>8</sup> Bapak Nopialis, Nasabah Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat, Wawancara, Sudirman, Tanggal 18 Mei 2011.

Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Bapak Nopialis yang telah meminjam dan untuk tambahan modal sebesar Rp. 10 juta kepada pihak bank riau dengan periode pinjaman 24 bulan dengan bunga 18 % pa flat. Untuk mengembalikan pinjaman Pak Nopialis harus membayar pinjaman setiap bulan dengan angsuran tetap, bunga tambah dengan angsuran pokoknya perbulan. Untuk mengetahui berapa angsuran pokok dalam angsuran bunga yang harus dibayar Pak Nopialis per bulan adalah sebagai berikut :

Perhitungan angsuran kredit :

Jumlah Pinjaman : 10.000.000

Bunga : 18 % pa flat

Jangka Waktu Pinjaman : 24 bulan

Angsuran pokok = Jumlah pinjaman : Jangka waktu pinjaman

$$\text{Rp. 10.000.000} : 24 \text{ bulan} = \text{Rp. 416.660 per bulan}$$

Angsuran Bunga = Jumlah pinjaman : Bulan x Jumlah Bunga

$$= \text{Rp.10.000.000} : 12 \times 18 \% \text{ pa flat}$$

$$= \text{Rp. 149. 999}$$

Jadi angsuran pokok yang harus dibayar perbulan oleh Pak Nopialis adalah sebanyak Rp. 416.660 dan angsuran bunga perbulannya adalah Rp. 149.999

Total angsuran yang harus dibayar Pak Nopialis setiap bulan adalah angsuran pokok + angsuran bunga.  $\text{Rp. 416.660} + \text{Rp.149.999} = \text{Rp. 566.659}$

Jadi, total angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh Pak Nopialis adalah Rp. 566.659

**B. Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Realisasi Program BPD Peduli  
Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Riau Kepri  
Cabang Pasar Pusat**

**1. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Dalam menjalankan usaha pasti adanya hambatan yang terjadi baik dari pihak bank sebagai lembaga pemberi kredit atau dari pihak pengelola dana oleh nasabah. Seperti jumlah dana yang dipinjam, jumlah angsuran yang dibayar setiap bulan, dan hambatan dalam mengembangkan usaha. Tetapi hambatan yang sering terjadi oleh setiap perusahaan akan berbeda antara satu dengan usaha lainnya, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UKM antara lain kurangnya kemampuan pengelolaan dalam manajemen usaha, kurangnya kemampuan untuk melakukan pengendalian penggunaan dana, dan kurangnya kemampuan perencanaan dalam menjalankan usaha.

Ada beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah kurangnya modal dalam mengembangkan usaha. Sering keluhan disampaikan oleh para pengusaha kecil dan menengah adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, pada hal modal tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha tersebut. Banyak orang memiliki keahlian tapi tidak memiliki modal yang cukup dalam mengembangkan usaha, Namun untuk mendapatkan kredit perbankan bukan hal yang mudah bagi para pengusaha kecil maupun menengah hal ini disebabkan faktor persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan

kredit tersebut, belum lagi kalau pengajuan kredit ditolak yang bisa menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan usaha, selain itu ada yang juga yang belum mengetahui bagaimana mendapatkan pinjaman hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan akses informasi tentang prosedur mendapatkan dana khususnya para pengusaha kecil dan menengah sangat rendah. Biasanya mereka mencari jalan agar dapat memperoleh dana cepat yaitu dengan meminjam sesama pengusaha atau rentenir.<sup>9</sup>

Faktor lain juga terdapat pada Kemampuan Manajerial yang rendah. Kebanyakan para pengusaha dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha, kegiatan usaha yang tanpa membuat rencana seperti menjalankan usaha yang penting bisa jalan, tanpa mengantisipasi hambatan yang akan terjadi dalam kegiatan usahanya tersebut.

Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Bapak Muliawarman yang telah menjadi nasabah bank riau beliau meminjam dana kepada pihak bank sebesar 10 juta yang akan digunakan untuk penambahan modal usaha. Karena lemahnya perencanaan dalam mengembangkan usaha oleh bapak muliawarman dan pihak Bank juga tidak memberikan arahan atau bimbingan dalam penggunaan dana sehingga usaha tersebut mengalami kerugian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak Hadi Pratikno, wawancara, Sudirman, Tanggal 02 Juni 2011

<sup>10</sup> Bapak Muliawarman, Nasabah pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru, Wawancara, Sudirman, Tanggal 02 Juni 2011

Sedangkan Bapak Nopialis mengatakan bahwa dalam menjalankan usaha pasti adanya hambatan-hambatan. Hambatan tersebut bisa dari permodalan atau pengelolaan usaha yang dijalankan. Pasang surutnya usaha pasti sering dialami oleh para pengusaha kecil maupun menengah, karena tidak akan selamanya usaha yang kami jalankan ini mendapat keuntungan atau kerugian secara terus menerus.<sup>11</sup>

Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung lajunya pertumbuhan usaha kecil dan menengah khususnya para UKM dalam mengembangkan usaha selain perlu dana juga membutuhkan adanya bimbingan dalam pengelolaan manajemen usaha agar bisa berkembang dan mampu untuk memenuhi kewajibannya bagi UKM yang punya pinjaman ke Bank. Mengingat pentingnya dana bagi kegiatan usaha untuk usaha kecil maupun menengah, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak bank sebagai lembaga pemberi kredit dengan usaha kecil dan menengah. Kerjasama ini perlu dilakukan agar permasalahan diantara kedua belah pihak tersebut bisa diatasi dengan baik.

Untuk itu pihak Bank perlu memberikan bimbingan, hal ini menunjukkan bahwa nasabah belum mengetahui teknik-teknik atau cara dalam menjalankan usaha dengan baik dan bisa dikatakan bahwa pengetahuan atau ilmu dalam mengembangkan usaha sangatlah kurang untuk itu pihak Bank mengadakan

---

<sup>11</sup> Bapak Nopialis, Nasabah Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat, Wawancara, Sudirman, Tanggal 02 Juni 2011.

penyuluhan tentang prospek usaha yang jelas, sehingga dengan adanya penyuluhan ini para pengusaha bisa memilih jenis usaha yang tepat guna kelangsungan usaha tersebut.

## **2. Faktor Pendorong Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Dalam menjalankan suatu usaha diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan disini berguna untuk menunjang hasil usahanya apakah menjadi baik atau malah sebaliknya. Dengan mengadakan pengawasan, dapat mencegah kemungkinan penyimpangan terjadi akan segera diketahui.

Kredit merupakan unsur penting didalam neraca Bank dan sering menunjukkan suatu bagian berapa besar investasi Bank yang bersangkutan. Untuk itu harus ada pengawasan yang memadai terhadap kredit tersebut, agar laporan keuangan yang disajikan menjadi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Dengan pengawasan yang baik diharapkan kesalahan dalam menganalisa kredit dapat dikurangi sehingga peluang terjadi kredit macet juga akan berkurang.

Dapat dipahami bahwa kredit merupakan asset penting dalam perbankan, oleh karena itu perusahaan memberikan perhatian yang besar dan bersungguh-sungguh dalam pengelolaan kredit. Untuk mengelolah kredit yang baik diperlukan adanya pengawasan terhadap kredit yang disalurkan.

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik.

Sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran agama islam.<sup>12</sup>

Berawal dari kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan maupun individu khususnya para pengusaha kecil maupun menengah yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya, pihak lembaga keuangan seperti perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung lajunya pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Seperti dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak Bank yang ikut serta dan berperan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya supaya makin maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang.

Menurut Bapak Sudirman yang telah menjadi nasabah Bank Riau menyatakan sangat perlu adanya pengawasan dari pihak bank. Diharapkan usaha yang debitur lakukan dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan terhadap total asset yang dimiliki oleh perusahaan juga dapat berguna untuk menunjang dan melancarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Bank dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.<sup>13</sup>

Pengawasan ini dapat berupa pengarahan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjalankan usaha yang dilakukan oleh debitur berupa penyuluhan usaha tentang prospek usaha yang jelas dalam pemberdayaan

---

<sup>12</sup> Didin Hafidudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah* ( Jakarta : Gema Insani Press, 2003 ) Hal. 1

<sup>13</sup> Bapak Sudirman, Nasabah Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat, Wawancara, Sudirman, Tanggal 02 Juni 2011.



UKM, sehingga dengan adanya penyuluhan usaha ini dapat menambah wawasan debitur tentang bagaimana mengembangkan usaha dengan baik dan para pengusaha bisa memilih jenis usaha yang tepat guna kelangsungan usahanya. Karena tidak adanya pengawasan dari pihak Bank sehingga memudahkan masyarakat yang meminjam dana tersebut tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tapi digunakan untuk keperluan lain atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dengan debitur, sehingga kredit yang dijalankan mengalami kemacetan atau tidak lancar.<sup>14</sup>

**C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat.**

Dana Pinjaman merupakan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang terdiri dari Tabungan, Giro, dan Deposito dan kemudian dana tersebut disalurkan oleh pihak Bank dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha.

Sebelum kredit disalurkan kepada calon debitur yang akan meminjam dana, pihak Bank memberikan persyaratan berupa surat permohonan kredit yang terdiri dari Foto Copy KTP. Foto Copy KK, Foto Copy Surat Nikah, Foto Copy Bukti Jaminan, Foto Copy Surat Izin Usaha, Foto Copy Pembukuan Catatan / Pendapatan dan Tujuan penggunaan dana. Setelah syarat-syarat tersebut sudah lengkap pihak bank menyeleksi apakah calon debitur yang mengajukan

---

<sup>14</sup> Bapak Sudirman, Nasabah Bank Riau, Wawancara Sudirman Tanggal 03 Juni 2011

permohonan kredit layak diberikan pinjaman atau tidak. Pimpinan Cabang memberikan keputusan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangan. Setelah pihak Bank memberikan keputusan persetujuan kredit, maka pemohon kredit menandatangani sanggup membayar hutang sebelum kredit dicairkan.

Ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari tentang masalah Ekonomi masyarakat dalam persepektif nilai-nilai Islam<sup>15</sup>

Pada intinya Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan Ekonomi dengan cara Islami. Yang dimaksud dengan Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi. Seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah Ekonoomi Islam.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari Ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau Negara muslim sendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara muslim dimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih kepada penekanan terhadap Perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu Ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan

---

<sup>15</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007)  
hal.5

dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia pada umumnya.<sup>16</sup>

Realisasi Program BPD Peduli dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan desperindag dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha. Kredit yang disalurkan kepada nasabah yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang akan meminjam dana, dana tersebut akan digunakan oleh nasabah dalam mengembangkan usahanya Bukan untuk keperluan lain, khususnya bagi para pengusaha kecil dan menengah supaya usaha yang dijalankan maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang. Sesuai dengan apa yang telah menjadi Visi Bank Riau yang mampu berkembang dan terkemuka di Daerah, memiliki manajemen propesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

Dalam Islam, Hubungan Pinjam-meminjam tidak dilarang. Bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraa. Hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yoqyakarta, *Ekonomi Islam* ( Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2008 ) Hal. 17

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke praktek* (Jakarta : Gema Insani) hal. 170

Dalam menjalankan suatu usaha pastinya ada hambatan-hambatan yang terjadi baik dari pihak Bank sebagai lembaga pemberi kredit atau dari pihak pengelola dana oleh nasabah. dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang tidak sesuai antara pihak bank dengan nasabah, tetapi dari kenyataannya banyak nasabah yang menyalahgunakan kredit yang telah diberikan oleh pihak Bank untuk mengembangkan usaha tapi digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga kredit yang dijalankan mengalami kemacetan. Penyebab dari kredit macet ini dari pihak nasabah dapat dilakukan dalam dua hal yaitu :

1. Unsur kesengajaan, dalam hal ini pihak nasabah sengaja tidak menggunakan dana tersebut untuk modal dalam mengembangkan usaha yang telah disepakati oleh pihak Bank dengan nasabah., faktor penyebab dari unsur kesengajaan ini adalah karena banyaknya kebutuhan lain yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat menggunakan dana tersebut tidak untuk usaha tetapi digunakan untuk keperluan lain atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak Bank dengan nasabah. Sebagaimana hal tersebut dalam pandangan Islam dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah kita sepakati sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa' ayat 34 yang berbunyi


  
 Artinya : Dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta

*pertanggungjawabannya. ( QS. A-Isra' : 34 )<sup>18</sup>*

---

<sup>18</sup> Depag, RI Al-qura'an Dan Terjemahan, ( Semarang : PT.Karya Toha Putra, 2002 ) Hal. 227

dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha supaya maju dan makin berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang. Kredit yang diberikan tersebut untuk kebutuhan konsumtif, produktif dan modal dalam mengembangkan usaha. Dalam ajaran Islam kita tidak boleh untuk bersifat boros, dan menggunakan dana tersebut yang sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼𐴽

*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu*

*ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ) ( QS.Al-maidah ayat:1 ).<sup>19</sup>*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa allah menyukai orang-orang yang menepati janji baik janji yang telah dibuat terhadap sesama manusia maupun janji terhadap allah yang sesuai dengan janji yang dibuat atau hukum-hukum yang dikehendaki.

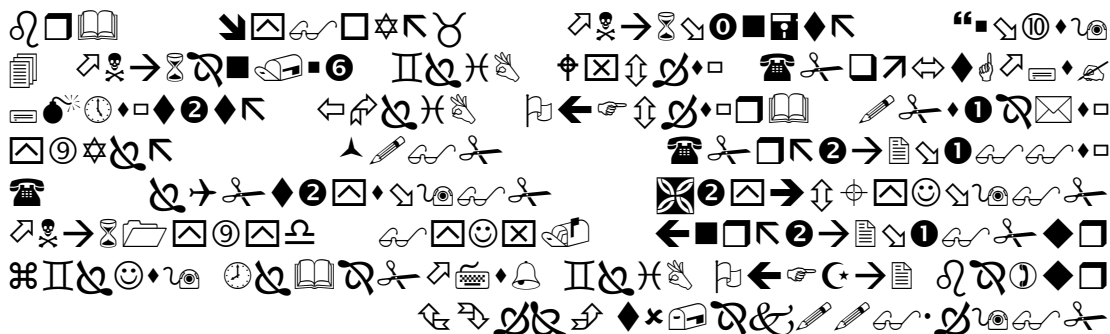
2. Adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini faktor yang mempengaruhinya adalah sinasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu pula. Misalnya kredit yang dibiayai mengalami kebangkrutan yang diakibatkan oleh faktor alam seperti Banjir, Kebakaran dan gempa. Untuk mengatasi adanya faktor alam tersebut maka sebaiknya pihak debitur mendapatkan asuransi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, dan persaingan usaha sejenis dengan para pesaing usaha lainnya seperti sama-sama berdagang usaha kue ditempat yang sama, hendaknya para pedagang sesuai dengan etika islam yakni dengan saling menghargai dan menghormati antara sesama pedagang dan pembeli, sebagai contoh pedagang jujur dalam berjualan tanpa mengurangi ukuran dan berat barang yang dijual kepada pembeli serta bersaing secara sehat dengan pedagang lainnya. dengan demikian akan tercipta kerukunan antara pedagang dan kepercayaan pembeli akan semakin meningkat sehingga pendapatan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 84

usaha akan semakin bertambah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat

Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :



*Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil*

*perniaegaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari*

*'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan*

*berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-*

*Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar*

*Termasuk orang-orang yang sesat. ( QS. Al-baqarah : 189 ).<sup>20</sup>*

Dengan etika Islam dalam menjalankan usaha pedagang maka akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga dari hasil usahanya jika dalam berdagang jujur, sehingga rezeki yang diberikan Allah Swt akan semakin bertambah. Oleh karena itu kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Bank dalam penyaluran kredit tanpa agunan ini dapat diatasi oleh para pengusaha. Sehingga para pengusaha kecil maupun menengah dapat membayar kewajibannya bagi UKM yang punya pinjaman kepada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan lancar.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 24

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat pada Surat Al-Anfaal ayat 28 yang berbunyi :

وَمَا لَكُمْ فِي آلِ أَبِي لَهَبٍ وَهَبٍ  
 لَمْ يَمْسَسْكُمْ شَيْءٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقْتُلْكُمْ  
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا أَعْيُنٌ مُبْصِرَةٌ  
 تَبْصُرُ الْوَيْهَبَ  
 لِيُؤْتِيَهُمْ الْوَيْهَبُ الْكَبِيرَ  
 وَمَا لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ  
 وَلَكُمْ بِهَا حُكْمٌ  
 وَأَنْ تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ  
 وَلَكُمْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ  
 وَتَتَذَكَّرُونَ  
 وَأَنْ تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ  
 وَلَكُمْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ  
 وَتَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai

*Cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. ( QS.*

*Al- Anfaal : 28 ).<sup>21</sup>*

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran islam bahwa status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut yaitu :

- Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Swt
- Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan.
- Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran agama islam atau tidak.
- Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, Hal 143



Dalam ajaran islam segala macam transaksi utang piutang telah dianjurkan kepada umatnya untuk memberi atau meminjamkan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana telah dijelaskan pada Surat Al-Isra' ayat 26-27 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ الْوَحْشِ وَالْجَبَلِ ۚ وَكَانَ سَعْدٌ لِّكُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ إِذَا قَامُوا إِلَيْكَ فِي الْحَدِيثِ ۖ وَكُن مِّنَ الْغَائِبِينَ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ الْوَحْشِ وَالْجَبَلِ ۚ وَكَانَ سَعْدٌ لِّكُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ إِذَا قَامُوا إِلَيْكَ فِي الْحَدِيثِ ۖ وَكُن مِّنَ الْغَائِبِينَ ۚ

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. ( QS. Al-Isra' : 26-27 ).<sup>23</sup>

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa dalam ajaran islam kita dianjurkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang berhak menerimanya, dan kita juga dilarang untuk bersifat boros.

<sup>22</sup> Op Cit, Muhammad Syafi'I Antonio, hal.9

<sup>23</sup> Op Cit, Hal. 227



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dari Realisasi Program BPD Peduli Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program BPD Peduli dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat dengan menjadikan para pengusaha kecil dan menengah tersebut sebagai Strategi Bussines Unit dalam melangkah Bank Riau sebagai bank yang fokus disektor usaha kecil dan menengah dan sebagai prioritas utama dalam penyaluran kredit melalui program kerja sama pihak Bank Riau dengan Desperindag.
2. Faktor penghambat dalam pemberdayaan UKM adalah kurangnya modal dalam mengembangkan usaha dan kemampuan manajerial yang rendah dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan. Sedangkan yang menjadi Faktor Pendorong dalam Pemberdayaan UKM diperlukan suatu pengawasan yang berguna dalam menunjangkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pengusaha kecil dan menengah, karena kurangnya pengawasan dari pihak bank sehingga memudahkan nasabah dalam menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain.

3. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa apabila seseorang dalam menggunakan dana yang ada harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dengan peminjaman dana, Mengingat pentingnya dana bagi para UKM maka diperlukan adanya kerjasama yang baik sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kerja sama ini perlu dilakukan agar permasalahan diantara kedua belah pihak tersebut bisa diatasi dengan baik. Dan kita juga dilarang untuk bersifat boros, sesungguhnya boros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada tuhan nya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pihak Bank lebih proaktif lagi dalam melakukan pemasaran untuk mencari pangsa pasar yang baru, maka akan semakin banyak UKM yang dapat bertahan sehingga sehingga perekonomian rakyat pun semakin meningkat.
2. Dengan adanya faktor penghambat dalam pemberdayaan UKM oleh pihak Bank, hendaknya menjadi motivasi untuk lebih mengatasi kendala dalam penyaluran kredit kepada debitur dimasa yang akan datang.
3. Pihak Bank lebih fleksibel tapi tetap selektif dalam penyaluran kredit dengan melakukan analisa terlebih dahulu mengenai resiko yang ada pada usaha yang akan dibiayai. Hal ini dilakukan agar kredit tersebut akan tetap dimanfaatkan secara efektif oleh UKM dalam mengembangkan usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Arief Rahmana, *Undang-undang dan Peraturan Tentang UKM*, [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (Diakses tanggal 01 April 2011)
- Basri, Faisal, *Pembangunan Kritik Dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 2003)
- CFISEL, TIM, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Bahana, 2009)
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002)
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Abadi, 2003)
- Dokumen Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Tahun 2008
- Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)
- Hafidudin, Didin dan Tanjung, Hendri, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003)
- Hafsah, Muhammad Jafar, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- , *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad, Bank Syari'ah (Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), (Yogyakarta : Ekonesia, 2003)
- Nugroho, Widi, *Informasi Kredit Usaha Kecil / Bina Wirausahaan*, (Pustaka Binaman Pressindo, 1997)

- Primiana, Ina, *Menggerak Sektor Rill UKM dan Industri*, (Bandung : Alfabet, 2009)
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yoqyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2008)
- Susilo, Y. Sri, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Selemba Empat, 2000)
- Saly, Jeane Neltje, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia, 2001)
- Sarasi, Vita, *Strategi Pengembangan Bisnis Kualitas Produk Pada UMKM*, (Jawa barat : Majalah Usahawan, 2001)
- Sholahuddin, M, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2007)
- Tohar, Muhammad, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : Konisius, 2002)
- Undang-undang Perkoperasian dan UMKM, (Bandung : TIM Redaksi Fokus Media, 2008)
- [www.bank.riaukepri / Sejarah singkat.co.id](http://www.bank.riaukepri/Sejarah%20singkat.co.id) (Diakses tanggal 28 Maret 2011)
- Zulkarnain, *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan UKM dan Penduduk Miskin)*, (Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa, 2006)